

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INKLUSI DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 PADANG**

DISERTASI



OLEH

**DAMRI
NIM : 19437**

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan
gelar Doktor Ilmu Pendidikan**

**PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

ABSTRACT

Damri 2019. The Implementation of Inclusive Learning in Junior High School 23 Padang. Dissertation. Postgraduate Programs of Padang State University

This research was derived from a problem found in the preliminary research indicating that there were several obstacles occurred while conducting teaching and learning process in an inclusive school. This study aims to examine the implementation of inclusive learning including preparation, implementation, student learning outcomes, learning assessment, and constraints faced. SMP Negeri 23 Padang was chosen as the location of the research as it is included in the pilot project and is regarded as the oldest school organizing inclusive learning in Padang and even in West Sumatra.

This research employs qualitative approach with three stages. The first stage is designing research instruments, choosing the location, and obtaining data through observation, interviews, and documentation studies. The number of the key informants selected through purposive sampling is 20. In the second stage, the researcher determined and analyzed general areas, selected areas, focused and selected observations, and then processed the data. Furthermore, in the third stage, the researcher identified general and specific findings, drew conclusions, and wrote a research report.

This research can be classified into a descriptive study. The results of the research reveal that (1) The plan and the implementation of inclusive learning have been strongly supported by the school fellows, community, and Special Education Department of FIP UNP but the school does not yet fully meet the requirements to conduct inclusive learning. (2) The inclusive learning process is generally integrated with regular students and those with special needs are handled by GPK. (3) Some students with special needs are not able to complete the learning mastery, but they have better achievement in skills, worship practices, arts and sports. (4) Head of Educational Department of Padang City, school principals, teachers, and students with special needs state that inclusive learning at SMPN 23 Padang run fairly well under various constraints. (5) The boundaries faced are (a) the regular teachers have lack of knowledge and skills on the concepts, characteristics, psychological and emotional condition of the students with special needs, (b) the regular teachers have lack of ability to interact and communicate with students with special needs, (c) the regular teachers often complain of serving students with special needs and frequently delegate their duties to GPK, (d) the teachers get difficulties to manage and create conducive classroom atmosphere. (e) GPK manage formidable tasks, and (f) the inclusive learning guidance books are not sufficient.

Based on the results of the research, the researcher concludes that instead of having various hindrances in implementing inclusive learning, SMP Negeri 23 is still tenacious to conduct the program. The researcher suggests the government to be serious to carry out equal and qualified inclusive learning, and find a professional solution.

Ignoring the current situations will lead to a tangled thread that is potential to be a paradigm. People will get an impression that the government seems to impose the inclusive program under numerous constraints.

ABSTRAK

Damri. 2019. Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Padang. Desertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Penelitian ini berawal dari temuan penelitian yang menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan pembelajaran inklusi dari persiapan/perencanaan, pelaksanaan, hasil belajar siswa, penilaian sekolah terhadap pembelajaran, dan kendala yang dihadapi sekolah pelaksana pembelajaran inklusi. Sekolah ini dijadikan lokasi penelitian karena termasuk *pilot project* sekaligus sekolah tertua yang menyelenggarakan pembelajaran inklusi di Kota Padang bahkan di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga tahapan. Tahap pertama membuat instrumen penelitian, menentukan setting dan lokasi, mengambil data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Informan kunci yang terseleksi secara purposif berjumlah 20 orang. Tahap kedua menentukan dan menganalisis kawasan-kawasan umum, kawasan terseleksi, observasi terfokus dan terseleksi, kemudian dilakukan pengolahan data. Tahap ketiga membuat hasil temuan umum dan khusus, menyimpulkan hasil dan menulis laporan penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini fleksibel, diuraikan dalam bentuk deskriptif. Secara prinsip temuan ini mendapat sekaligus menjawab tujuan penelitian antara lain: (1) Untuk melaksanakan pembelajaran inklusi didukung kuat oleh warga sekolah, masyarakat dan Jurusan PLB FIP UNP, namun pelaksanaanya belum memenuhi syarat sebagai sekolah inklusi yang setara dan bermakna, (2) Proses pembelajaran inklusi secara umum menyatu dengan siswa regular, sedangkan untuk ABKh yang mengalami kesulitan ditangani secara khusus oleh GPK, (3) Hasil belajar siswa berkebutuhan khusus bervariasi ada yang tuntas dan ada yang belum, sedangkan untuk keterampilan, praktik ibadah, seni serta olahraga banyak yang berprestasi, (4) tanggapan kepala Diknas kota Padang, kepala sekolah, guru, dan siswa berkebutuhan khusus menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran inklusi di SMPN 23 Padang berjalan sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai keterbatasan, (5) Permasalahan yang dihadapi sekolah adalah (a) masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru reguler untuk memahami konsep, karakteristik, kondisi psikologis dan emosional siswa berkebutuhan khusus, (b) terbatasnya kemampuan interaksi dan komunikasi guru reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. (c) guru reguler sering mengeluh melayani siswa berkebutuhan khusus sehingga penanganannya sering dilimpahkan kepada GPK. (d) guru mengalami kesulitan mengelola kelas, (e) GPK mendapat tugas yang berat, (f) Terbatasnya ketersediaan buku panduan pembelajaran inklusi

Kesimpulan penulis, meskipun SMPN 23 Padang memiliki berbagai keterbatasan, sekolah ini tetap melaksanakan pembelajaran inklusi. Saran penulis, jika pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran inklusi yang setara dan bermutu, tuntutan di atas harus dicarikan solusinya secara professional. Kalau kondisi ini terus terabaikan berarti pemerintah membiarkan benang kusut ini menjadi paradog, maka hampir dapat diduga pemerintah terkesan memaksakan program inklusi ini.

Lembar Pengesahan

Dengan persetujuan Komisi Promotor/Pembahas/Penguji telah disahkan
Disertasi atas nama :

Nama : *Damri*
NIM. : 19437

melalui ujian terbuka pada tanggal 6 September 2019

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang



Prof. Dra. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.

NIP. 19620919 198703 2 002

Koordinator Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fauzan".

Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd., M.Sc.

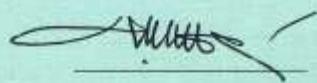
NIP. 19660430 199001 1 001

Persetujuan Komisi Promotor/Penguji

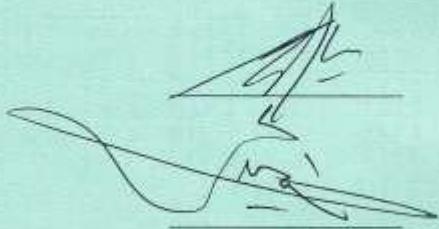
Nama : *Damri*
NIM. : 19437

Komisi Promotor/Penguji

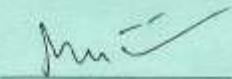
Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.
(*Ketua Promotor/Penguji*)



Prof. Dr. Hj. Elisna
(*Promotor/Penguji*)



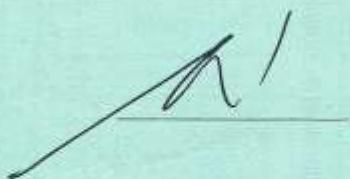
Dr. Jasrial, M.Pd.
(*Promotor/Penguji*)



Prof. Dr. H. Abizar
(*Pembahas/Penguji*)



Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd.
(*Pembahas/Penguji*)



Prof. Dr. Martinis Yamin, M.Pd.
(*Penguji dari Luar*)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karyatulis saya, disertasi dengan judul "Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Padang adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya sebagai acuan di dalam naskah saya dan juga pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 31 Mei 2019

Saya yang Menyatakan



DAMRI
NIM 19437

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Padang.

Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Doktor Teknologi Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Selama dalam penelitian dan penulisan disertasi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik perorangan maupun badan-badan terkait, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan sampai selesaiannya disertasi ini, terutama kepada seluruh keluarga besar Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Padang yang telah berkenan memberi izin penelitian (menghimpun fakta, data, informasi serta dokumen yang penulis perlukan) terkait dengan pelaksanaan pembelajaran inklusi

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr.H. Z. Mawardi Effendi, M.Pd; Prof. Dr. Hj. Elisna; dan Dr. H. Jasrial, M.Pd selaku promotor dan juga kepada Prof. Dr. Abizar dan Prof. Dr. Jamaris M.Pd selaku pembahas yang telah berjasa memberikan bimbingan dan arahan serta pembahasan dalam penyelesaian disertasi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih yang tulus ini penulis sampaikan, semoga segala bantuan dan pengorbanan waktu dan pikiran yang telah diberikan menjadi amal saleh dan menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Amiin.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	<i>i</i>
ABSTRAK	<i>ii</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>iii</i>
PERSETUJUAN KOMISI PRMOTOR /PENGUJI	<i>iv</i>
SURAT PERNYATAAN	<i>v</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>ix</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>x</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>xi</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pernyataan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Operasional Istilah.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendidikan Inklusi.....	16
1. Pengertian	16
2. Sejarah	18
3. Landasan	25
4. Tujuan.....	28
B. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	30
1. Pengertian Peserta Didik Berkebutuhan Kusus	30
2. Karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	31
C. Pembelajaran Inklusi di Sekolah	42
1. Konsep Pengembangan Pembelajaran Inklusi.....	42

2. Kurikulum Pembelajaran Inklusi.....	56
3. Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Inklusi.....	58
D. Penelitian yang Relevan.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian.....	69
B. Langkah-Langkah Penelitian.....	71
C. Lokasi Penelitian	72
D. Informan Penelitian	73
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Pengolahan Data Penelitian.....	77
G. Teknik Keabsahan Data.....	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	79
1. Temuan Umum	79
2. Temuan Khusus	103
B. Pembahasan.....	154
C. Keterbatasan Penelitian	185

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	187
B. Saran.....	195

DAFTAR PUSTAKA..... **200**

DAFTAR LAMPIRAN **207**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Para pionir yang berkontribusi dalam pendidikan inklusi	21
2.2. Dimensi Kelas Umum dan Kelas Inklusi	55
3.1.Deskripsi informan penelitian	73
4.1 Program tahunan pendampingan pembelajaran pembimbingan	119
4.2 Program semester pendampingan pembelajaran pembimbingan	120
4.3 Nilai Ujian MID Semester Genap SMP Negeri 23 Padang	138
4.4 Potensi dan Prestasi Akademik ABK Di SMPN 23 Padang	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Peta konsep penelitian yang akan dikembangkan	15
2.1. Peserta didik Tunanetra (gangguan penglihatan).....	32
2.2. Peserta didik Tunarungu (gangguanpendengaran).....	34
2.3. Peserta didik Tunagrahita (retardasi mental)	36
2.4. Peserta didik tunadaksa (gangguan fisik).....	37
2.5. Peserta didik tunalaras (gangguan emosi).....	38
2.6. Peserta Didik Berkesulitan Belajar	40
2.7. Peserta Didik Autis	41
2.8 Konsep pengembangan pembelajaran di sekolah inklusi.....	44
2.9 Konsep pengembangan pembelajaran inklusi 2 dalam bentuk alur	45
2.10 Alur pelaksanaan pembelajaran yang efektif	53
2.11. Lingkungan pembelajaran yang ramah perbedaan.....	54
2.12. Kurikulum Pembelajaran Inklusi	56
2.13. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar	59
3.1 Langkah-langkah Penelitian.....	72
4.1 Alur Kerja Layanan Khusus Bagi ABK	121
4.2 Alur Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus	122
4.3 Pelaksanaan PPI di Ruang center.....	127
4.4 Keadaan kelas inklusi.....	135
4.5 Kerjasama dengan orang tua	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lembar Kerja Analisis Kawasan.....	207
2. Hasil Observasi Terfokus.....	219
3. Analisis Taksonomi.....	224
4. Observasi Terseleksi	239
5. Analisis Komponensial	242
6. Contoh-Contoh respon dan ungkapan ABK di SMPN 23	258
7. Alat Identifikasi ABK	270
8. Kisi-Kisi Penelitian	279
9. Pedoman Observasi.....	280
10. Pedoman Wawancara	281
11. Angket Orang Tua	283
12. Visi dan Misi Sekolah.....	285
13. Struktur Organisasi Sekolah.....	286
14. Identitas Sekolah	287
15. Identitas Kepala Sekolah	289
16. Identitas Koordinator Program Inklusi SMPN 23 Padang.....	290
17. Data Guru Pembimbing khusus	291
18. Formasi Siswa ABKh yang Belajar di SMPN 23 Padang	292
19. Potensi dan Prestasi Akademik ABK	294
20. Kelengkapan Ideal Peralatan Belajar ABK.....	296
21. Sikap dan Kebiasaan Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus.....	306
22. Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	308
23. Nilai Ujian Mid Semester ABK	310
24. Pragam Tahunan Pendampingan Pembelajaran.....	311
25. Program Semester Pendampingan Pembelajaran	312
26. RPP Modifikasi	313
27. PPI.....	325
28. Alur Kerja Layanan Khusus bagi ABK	331

29.	Alur Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus	332
30.	Catatan Lapangan.....	333
31.	Format Wawancara	347
32.	Daftar Prestasi Siswa berkebutuhan khusus	350
33.	Dokumentasi	354

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan potensi peserta didik, pewarisan dan transformasi nilai-nilai budaya, moral, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pidarta, 2007). Selanjutnya Dewantara (2009) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran, jasmani dan mengembangkan kesempurnaan hidup peserta didik agar selaras dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Pandangan di atas sesuai dengan aliran filsafat humanisme yang menitikberatkan bahwa pendidikan dan pembelajaran pada hakikatnya perlakuan manusia untuk semua manusia secara manusiawi tanpa kecuali, termasuk siswa berkebutuhan khusus dengan misi utamanya adalah mengembangkan potensi manusia, sehingga mereka mampu menghadapi kerumitan dan masalah hidupnya. Aliran ini menekankan bahwa sistem pembelajaran harus dilaksanakan secara manusiawi sesuai kemampuan dan karakteristik di dalam suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Selanjutnya teori belajar behavioristik mengingatkan bahwa proses, tindakan dan hasil pembelajaran harus menitikberatkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari interaksi stimulus dengan respon yang diterimanya. Kedua aliran dan teori di atas merupakan pradikma dan arah pembelajaran untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk semua secara merata, berkelanjutan dan berkeadilan.

Tuntutan di atas tertuang di dalam Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Merujuk kepada tuntutan di atas mendorong pemerintah dan masayarakat untuk melaksanakan pendidikan yang merata, bermutu dan berkelanjutan. Mencermati kenyataan sekarang, banyak permasalahan pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang belum tuntas sampai ke akar-akarnya. Menurut Sulistyadi (2014) permasalahan paling menonjol dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah persoalan pemerataan dan persamaan hak. Artinya bagaimana pemerintah menyiapkan sistem pendidikan yang dapat menyediakan akses, *capasity building*, yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang, jenis dan satuannya, sehingga pendidikan benar-benar dapat menjadi wahana bagi pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pencapaian tujuan negara.

Pernyataan di atas didukung oleh Garnida (2015) yang menyatakan bahwa masalah pemerataan pendidikan di Indonesia semakin jelas adanya, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak dan remaja pada usia sekolah yang belum dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang usianya. Selain itu masih banyak warga negara usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam

sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia, ketidaksesuaian sistem yang ada dengan fakta empiris (Musyaddad, 2013).

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah penyelenggara. Berbagai pendapat ahli pendidikan khusus mengungkapkan antara lain Sunanto (2009) dan Tarnoto (2016), masalah yang dihadapi penyelenggara pendidikan inklusi saat ini adalah rendahnya kompetensi guru, minimnya kepedulian orang tua, banyaknya peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu kelas dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli professional dan pemerintah. Selanjutnya hasil penelitian Fuadi (2011) dan Anggrainy (2014) mendapati: *pertama* bahwa pendidikan inklusi yang diselenggarakan saat ini cenderung mendeskripsikan penyatuan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal; *kedua* penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusi; *ketiga* belum semua kategori peserta didik berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik di sekolah inklusi; *keempat* penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Berikutnya hasil penelitian Darma & Rusyidi (2016) mendapati bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah memunculkan berbagai persoalan seperti tidak singkronnya antara konsep dan pelaksanaannya baik dari segi peserta didik, kualifikasi guru, sarana dan prasarana maupun dukungan orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian di atas, hampir dipastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusi di Indonesia saat ini banyak yang mengalami permasalahan yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Jika kondisi ini diabaikan maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran inklusi nyaris menjadi wacana saja. Pada hal Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendididikan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik normal.

Tuntutan di atas bukan sekedar menggabungkan dan membelajarkan siswa berkebutuhan khusus saja, tetapi yang paling penting adalah menyiapkan sumber daya pendidik, kurikulum, aksesibilitas, sarana, sumber belajar, media, dukungan kuat serta perlindungan nyata untuk mereka semua di sekolah inklusi. Diakui, dari masa ke masa perkembangan siswa berkebutuhan khusus semakin meningkat jumlahnya. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2005 yang menunjukkan terdapat 4,2 juta orang peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia, sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 8,3 juta (Tarnoto, 2016). Dengan kata lain jumlah peserta didik berkebutuhan khusus setiap tahun selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian lembaga Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia terus

menunjukkan peningkatan pada susenas tahun 2003, 2006, 2009 hingga 2012. Data ini menggambarkan pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indoensia.

Selanjutnya hasil penelitian Johnsen & Skjorten (2003) menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus terdapat pada semua negara, bahkan dipastikan tidak satupun negara di dunia yang terbebas dari anak/siswa berkebutuhan khusus. Pada tahun 2010 Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat ada 10% dari total jumlah penduduk dunia atau 650 juta orang yang mengalami disabilitas, 80% diantaranya tinggal di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Data di atas didukung oleh UNICEF 2013 yang mendapati jumlah anak penyandang disabilitas di dunia sebanyak 93 juta jiwa, 1 dari 20 orang anak mengalami disabilitas sedang dan berat (Sheehy & Budiyanto, 2014)

Untuk mengakomodasi tuntutan akan pelayanan pembelajaran penyandang disabilitas di berbagai negara temasuk Indonesia, pemerintah telah berupaya membelajarkan mereka dengan berbagai bentuk program, salah satunya adalah program pendidikan inklusi. Terkait dengan upaya di atas, Pemerintah Kota Padang telah merespon positif program ini dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 tahun 2015. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menegaskan agar semua sekolah-sekolah di Kota Padang dapat menampung peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Padang saat ini jumlah total sekolah penyelenggara program ini tercatat 134 sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Fitri, Damri, & Hasan, 2013) termasuk SMPN.23 Padang.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Padang merupakan sekolah yang pertama melaksanakan pembelajaran inklusi di kota Padang bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Sekolah ini mulai melaksanakannya tahun 2000 dengan menerima satu orang peserta didik berkebutuhan khusus kategori B. (tunarungu) Pada masa awal pelaksanaannya, sekolah ini mendapat pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dukungan dan komitmen nyata ini dibuktikan dengan menotadinasan 3 orang tenaga guru pembimbing khusus ke sekolah tersebut (Patrizal, Damri, & Irdamurni, 2013).

Selama 19 tahun waktu pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah ini, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaannya sekarang, patut kita bandingkan dengan berbagai pernyataan para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menemukan banyak terjadi kegagalan sekolah penyelenggara inklusi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam posisi ini penulis ingin membuktikan apakah SMPN.23 Padang termasuk yang mengalami seperti yang dinyatakan di atas. Melalui grand tour awal penulis menyatakan proposisi, meskipun sekolah ini telah berpengalaman melaksanakan proses pembelajaran inklusi tidak serta merta proses pembelajarannya berjalan secara efektif. Untuk memastikan secara valid bagaimanakah persiapan penyelenggaraan sekolah, proses pelaksanaan, hasil yang dicapai serta permasalahan yang muncul, maka penulis melakukan studi pendahuluan dan diketemukan beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru reguler untuk memahami karakteristik, kondisi psikologis dan emosional siswa berkebutuhan khusus serta kurangnya interaksi dan komunikasi diantara guru reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga layanan optimal belum terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Terbatasnya jumlah guru reguler yang professional untuk membimbing peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Terbatasnya fasilitas dan aksesibilitas yang akan digunakan siswa hambatan penglihatan hambatan fisik dan hambatan pendengaran seperti pengadaan, peta timbul, kursi roda, petunjuk penggunaan huruf braille dan sistem komunikasi tunarungu.
4. Belum terbentuknya *Fokus Group Discussion* (FGD), *lesson study* dan *team teaching* secara khusus untuk menangani berbagai persoalan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.
5. Prestasi akademik yang dicapai peserta didik berkebutuhan khusus belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah. terutama pada pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
6. Ketika proses pembelajaran berlangsung guru reguler sering mengeluh dan tidak mampu melayani siswa berkebutuhan khusus sehingga akhirnya pelayanan pembelajarannya sering dilimpahkan kepada guru pembimbing khusus.

7. Sulitnya guru melaksanakan pengelolaan kelas dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas yang beragam peserta didik ini membuat peserta didik sering gelisah dan keluar masuk kelas, bahkan ada yang menyendiri, baik di dalam maupun di luar kelas.

Fenomena di atas adalah hasil studi awal penulis di SMPN 23 Padang yang penulis akui belum terurai secara lengkap, jelas dan rinci, tetapi memerlukan penelitian secara mendalam. Sebagai perbandingan, fenomena ini muncul bukan saja di sekolah ini saja, melainkan juga terjadi pada sekolah-sekolah penyelenggara inklusi di luar Provinsi Sumatera Barat (hasil penelitian yang relevan). Munculnya fenomena ini menimbulkan banyak reaksi keras dari berbagai ahli pendidikan khusus, seolah-olah terdapat benang kusut yang cukup rumit dan serius yang tidak mudah menyelesaiakannya, terutama mengenai sistem dan penanganannya, seperti yang diungkapkan Mulyono (2003) yakni “untuk dapat menjalankan pembelajaran inklusi yang baik dan profesional, diperlukan sistem dan tata kelola sekolah yang baik. Hanya saja sekolah inklusi yang ada sekarang masih sebatas angan-angan, dipahami dan dijalankan dengan cara yang keliru, termasuk pola-pola pelaksanaan pembelajarannya yang cenderung menggunakan cara regulasi.

Kondisi yang sama juga dinyatakan oleh Strnadova, Hajkova, & Kvetonova (2015) bahwa tidak dapat dipungkiri telah terjadi *banality* (kedangkalan dan keterbatasan pengetahuan serta tindakan secara otentik dan komprehensif) dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah-

sekolah inklusi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terutama didalam melaksanakan pembelajarannya.

Berdasarkan pernyataan para peneliti di atas tampak pada umumnya mereka sepakat menyatakan bahwa terjadinya berbagai permasalahan yang sulit untuk ditangani adalah akibat dari kedangkalan (*banality*) pemahaman konsep dan implementasi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Fenomena dan pendapat inilah yang menjadi proposisi/pijakan logis yang menantang penulis untuk membuktikan terdapat tidaknya masalah tersebut di SMPN 23 Padang sebagai sekolah inklusi tertua dan *pilot project* di Kota Padang Sumatera Barat. Penulis mencari jawabannya melalui penelitian kualitatif ini dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Padang”. Untuk mengurai lebih jelas berikut ini penulis jelaskan fokus dan pernyataan masalah, tujuan, manfaat dan definisi operasional istilah.

B. Fokus Penelitian dan Pernyataan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan dan manfaat penelitian ini secara umum fokus utama penelitian ini adalah“ Bagaimanakah Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Padang. Bertitik tolak dari fokus utama di atas, maka yang menjadi pernyataan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sekolah mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran inklusi untuk peserta didik berkebutuhan khusus?

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran inklusi oleh guru regular dan GPK ?
3. Bagaimanakah hasil yang diperoleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah pembelajaran inklusi dilaksanakan?
4. Bagaimanakah tanggapan sekolah, guru dan peserta didik berkebutuhan khusus terkait dengan pelaksanaan pembelajaran inklusi ?
5. Bagaimanakah bentuk permasalahan yang dihadapi sekolah, guru dan siswa berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran inklusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kesiapan sekolah di dalam melaksanakan pembelajaran inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Mengeksplorasi bagaimana proses pembelajaran inklusi yang dilaksanakan guru dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus.
3. Mengetahui bagaimana hasil belajar yang diperoleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah pembelajaran inklusi dilaksanakan.
4. Mengekplorasi bagaimana tanggapan kepala dinas, kepala sekolah, guru, GPK dan peserta didik berkebutuhan khusus terkait dengan pelaksanaan pembelajaran inklusi.
5. Mengetahui bagaimana bentuk permasalahan yang dihadapi sekolah selama pembelajaran inklusi berlangsung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, berikut ini penulis jelaskan manfaat penelitian ini dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata, baik teori maupun praktik, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi sekolah penyelenggara, guru, peserta didik berkebutuhan khusus, orang tua, Dinas Pendidikan, mahasiswa dan peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan dan issu dalam konteks yang sama ataupun berbeda. Walaupun pada dasarnya program ini sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun secara lengkap dan mendalam penelitian tentang pelaksanaan dan pengembangan pembelajarannya inklusi terutama di SMPN.23 Padang belum ada.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya bagaimana seharusnya pendidikan inklusi tersebut dilaksanakan dengan baik dan profesional.
- b. Bagi guru sebagai pelaksana pembelajaran inklusi di kelas diharapkan dapat menjadi referensi bacaan, acuan, sumber tentang bagaimana sebaiknya proses pembelajaran inklusi dilaksanakan?
- c. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan dapat menjadi pemotivasi diri dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.

- d. Bagi orang tua diharapkan dapat menjadi panduan bagaimana cara pola asuh jika mempunyai anak berkebutuhan khusus.
- e. Bagi pemerintah yang diwakili dinas pendidikan diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran inklusi di Kota Padang.
- f. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi rujukan dan informasi terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, karena sampai saat ini tidak banyak masyarakat yang mengetahui informasi seputar pelaksanaan dan permasalahan pembelajaran inklusi.

E. Definisi Operasional Istilah

1. Pelaksanaan

Menurut pendapat De Boer, Pijl, & Minnaert (2011) yang dimaksud pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mewujudkan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat dan mulainya pelaksanaan dan bagaimana cara melaksanakannya. Sedangkan menurut Villa & Thousand, (2005) pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis tegaskan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi sebuah kenyataan. Adapun pelaksanaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan inklusi ke dalam bentuk proses pembelajaran inklusi yang dilaksanakan SMPN.23 Padang.

2. Pembelajaran Inklusi

Menurut O'neil & Marsick (2007) pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya mengenai pembelajaran inklusi, Albrecht & Snyder (2005) menjelaskan "*special education means specifically designed instruction to meet the unique needs of a child with disability*". Artinya pendidikan dan pembelajaran inklusi adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Fry, Ketteridge, & Marshall (2003) menjelaskan bahwa pembelajaran inklusi adalah sistem pelaksanaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Selanjutnya UNESCO dalam *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All* :

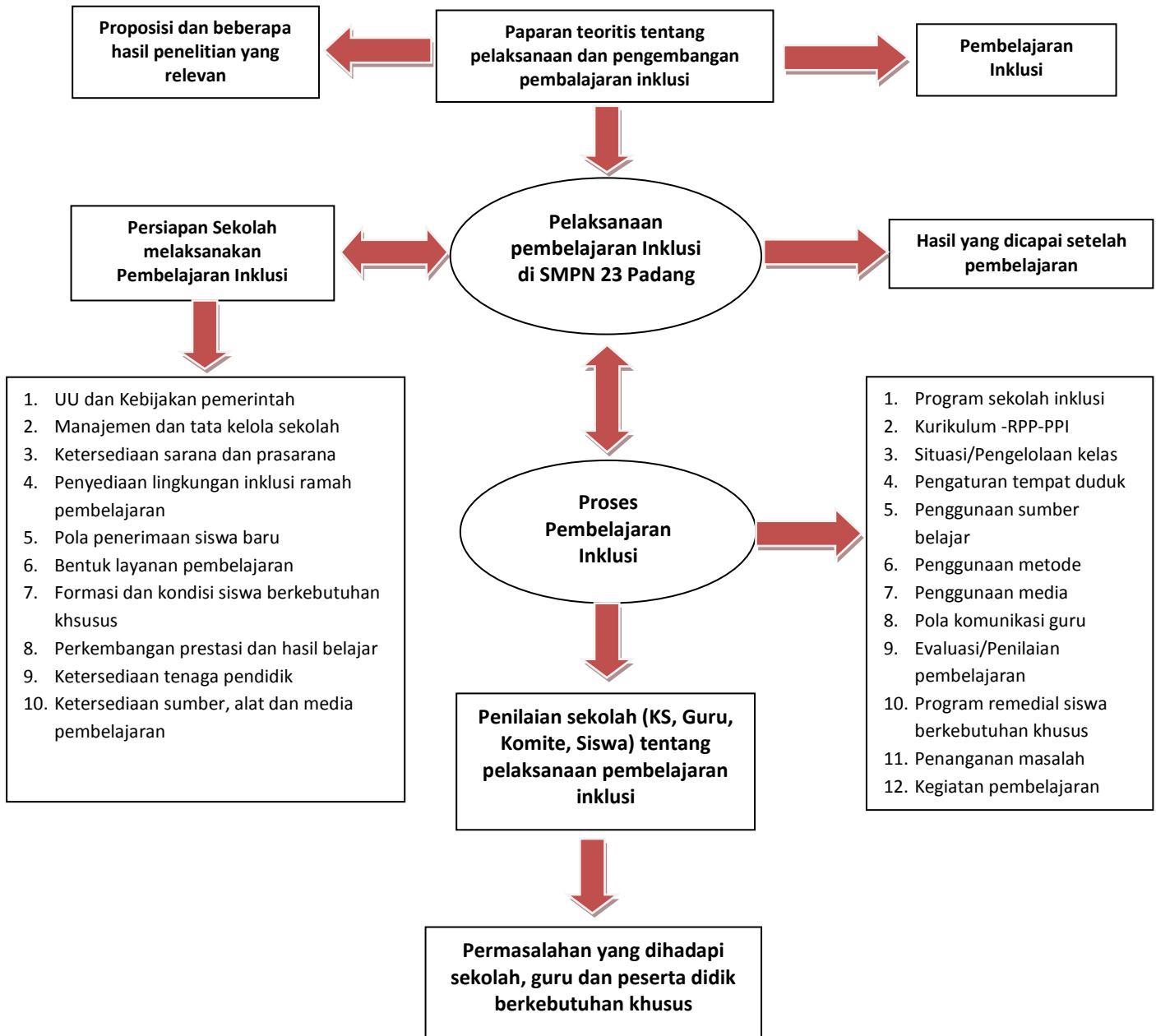
Pembelajaran Inklusi dipandang sebagai suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi pengecualian dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur, dan strategi, dengan visi bersama yang mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan pentingnya tanggung jawab dan pengaturan untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994).

Dari beberapa defenisi di atas maka secara umum dapat penulis maknai bahwa pembelajaran inklusi adalah penyelenggaraan penbelajaran oleh sekolah untuk mendidik peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bersama dengan peserta didik normal lainnya sehingga mereka mampu mengembangkan potensi dirinya. Adapun pembelajaran inklusi yang penulis maksud adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sebuah sekolah.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Padang

Sekolah Menengah Pertama adalah sebuah tingkatan sekolah yang berada di atas Sekolah Dasar. Sekolah yang penulis maksud di sini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Padang. Alasan logis penulis memilih dan menentukan sekolah ini menjadi objek penelitian karena sekolah ini adalah sekolah yang pertama melaksanakan pendidikan inklusi dari tahun 2000 sampai sekarang. Sekolah ini dijadikan pilot project di Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat (Patrizal et al., 2013). Sekolah ini beralamat di Jln. Limau Manis Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh Kota Padang. Untuk

membantu pembaca melihat alur pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan, di bawah ini penulis gambarkan peta konsep yang dikembangkan sebagai berikut:



Gambar. 1.1 Peta konsep penelitian yang dikembangkan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan pembelajaran inklusi di SMP Negeri 23 Padang, didapatkan **22 temuan umum** dan **16 temuan khusus**. Selanjutnya dapat penulis tarik kesimpulan sekaligus menjawab tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesiapan Sekolah Mengawali Pembelajaran Inklusi
 - a. Sekolah ini mempersiapkan dan memulai pembelajaran inklusi pada tahun pembelajaran 2000/2001 hanya sebatas rintisan, baik, tekad, semangat maupun keberaniannya. Dalam perkembangannya sampai sekarang sekolah ini selalu menyatakan siap baik komitmen maupun kemampuan yang tersedia seperti persiapan administrasi, visi, misi, tujuan, program, sarana prasarana, peralatan, media pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan. Semua persiapan di atas adalah hasil kolaborasi kepala sekolah dengan tim ahli PLB FIP UNP, guru bidang studi, guru pembimbing khusus, pegawai sekolah dan masyarakat.
 - b. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran inklusi tetap mengacu kepada kurikulum Nasional KTSP dan Kurikulum tahun 2013 kurikulum muatan lokal dan kurikulum modifikasi.
 - c. Pengembangan kurikulumnya dilakukan dalam bentuk silabus dan RPP, apabila diperlukan sekolah membuat kurikulum yang dimodifikasi dan

program pembelajaran Individual (PPI) yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan karakteristik siswa.

- d. Pelayanan pembelajarannya terdiri dari tiga bentuk (1) layanan pembelajaran penuh (2) layanan pembelajaran yang dimodifikasi (3) layanan individualisasi.
- e. Sampai tahun 2011 pelaksanaan pembelajarannya menjadi beban sekolah baik dana, sarana dan prasarana, aksesibilitas, sumber belajar, alat peraga dan media pembelajaran. Mulai tahun pelajaran 2012 s/d tahun 2014 secara bertahap beban tersebut mulai teratasi karena sekolah ini dijadikan pilot projek sekolah inklusi di Kota Padang bahkan di Sumatera Barat. Program ini mendapat bantuan dana secara berkala dari pemerintah pusat. Selanjutnya tahun 2015 program ini dihentikan. Akibatnya gerak langkah pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran inklusi menjadi jalan di tempat.
- f. Semua guru-guru reguler di sekolah ini ternyata tidak ada yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, konsekuensinya guru regular memiliki keterbatasan, kedangkalan penguasaan konsep dan implementasi (banality) pembelajaran inklusi, akhirnya banyak menyisakan berbagai permasalahan pelayanan dan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Kondisi ini menjadi awal ketergantungan, setiap ada masalah yang muncul sering dilimpahkan kepada guru pembimbing khusus
- g. Jumlah GPK dengan siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini tidak sebanding GPK empat orang sedang jumlah siswa berkebutuhan khusus

yang dia bimbing berjumlah 45 siswa. Keluhan lainnya GPK dipandang sepenuhnya bahkan bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus seperti orang tua tidak peduli, tidak pernah sepi dari ancaman fisik perlakuan siswa berkebutuhan khusus, pusat pengaduan guru reguler tentang siswa berkebutuhan khusus yang bermasalah (sebagai palang pintu). Akibatnya GPK mendapat kerja yang berat sedangkan di sisi lain statusnya hanya honor lepas tidak pasti nasib keberlanjutannya dan sampai sekarang kekurangan GPK tersebut belum ada solusinya.

2. Proses pelaksanaan pembelajaran inklusi.

Secara umum proses pembelajaran inklusi menyatu dengan siswa regular yang dilaksanakan oleh guru-guru regular di bawah bimbingan koordinator inklusi /wakil kepala sekolah dan didampingi oleh GPK. Berhubung banyaknya mata pelajaran dan luasnya cakupan membuat penulis sulit meneliti pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan. Untuk itu penulis hanya memfokuskan penelitian ini kepada tiga mata pelajaran penting yang diujianasionalkan (UN) yakni mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia. Selama proses pembelajaran pada tiga mata pelajaran ini, ternyata banyak hambatan yang terjadi oleh guru seperti yang telah penulis utarakan pada temuan umum dan khusus. Konskuensinya siswa berkebutuhan khusus sering terabaikan karena kelas mayoritas tetap menjadi prioritas. Apalagi semenjak tahun 2015, guru tidak ada lagi mendapat penataran dan latihan tentang pelayanan dan pelaksanaan pembelajaran

inklusi, termasuk pembelajaran kompensatoris, ditambah lagi dengan honor gairah mengajar/insentif tidak ada lagi, Akibat dari kondisi ini prilaku guru bidang studi terkesan pasif, tidak ada inisiatif bahkan terkesan terjadi pemberian terhadap siswa. Sehingga akhirnya setiap permasalahan yang muncul oleh siswa berkebutuhan khusus dilimpahkan penanganannya kepada GPK.

3. Hasil belajar yang didapatkan siswa berkebutuhan khusus

Meskipun kondisi yang terjadi seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, secara umum hasil belajar yang dicapai siswa berkebutuhan khusus, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sangat bervariasi. Penguasaan pengetahuan tampak pada capaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah pada semua mata pelajaran, mereka ada yang mencapai kategori tuntas dan ada yang tidak tuntas, baik pada ujian mid semester, maupun ujian akhir sekolah tiap-tiap semester dan akhir tahun pelajaran. Namun berbeda dengan nilai keterampilan dan nilai praktik ibadah agama, seni dan olahraga, ada diantara mereka yang memiliki prestasi hafal Al-Quran 2 juz bahkan juara MTQ dan menang lomba Hafiz Al-Quran di tingkat kecamatan.

4. Terkait dengan tanggapan kepala Dinas kota Padang, kepala Sekolah, guru, dan siswa berkebutuhan khusus tentang pelaksanaan pembelajaran inklusi.

Hampir semua personil sepakat bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMPN 23 padang sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan

kekurangan yang dihadapi namun secara bertahap akan terus ditingkatkan secara bersama-sama.

5. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi, secara prinsip sekolah merasakan sulitnya membelajarkan siswa berkebutuhan khusus secara profesional. Dalam kenyataanya:
 - a. Guru mengalami kesulitan memahami konsep, karakteristik, kondisi psikologis dan emosional siswa berkebutuhan khusus
 - b. Terbatasnya kemampuan interaksi dan komunikasi guru reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga layanan pembelajaran belum terpenuhi sebagaimana mestinya.
 - c. Ketika proses pembelajaran berlangsung guru reguler sering mengeluh melayani siswa berkebutuhan khusus sehingga akhirnya pelayanan pembelajarannya sering dilimpahkan kepada guru pembimbing khusus.
 - d. Sulitnya guru melaksanakan pengelolaan dan menciptakan suasana kelas yang kondusif di dalam kelas yang beragam peserta didik ini membuat peserta didik sering gelisah dan keluar masuk kelas, bahkan ada yang menyendiri, baik di dalam maupun di luar kelas.
 - e. Persoalan prinsip yang dihadapi GPK adalah setiap kesulitan belajar dan penyimpangan perilaku yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus baik waktu belajar dan istirahat selalu dilimpahkan kepada GPK.
 - f. Di saat pembelajaran berlangsung GPK sering disuruh masuk ke dalam kelas untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus padahal masalahnya

tidak begitu rumit. Secara psikologis keberadaan GPK membuat siswa berkebutuhan khusus risih dan merasa malu. Kondisi tersebut bukan saja terjadi dalam satu kelas tetapi juga terjadi di beberapa kelas. Beban seperti ini terasa berat oleh GPK karena tenaga GPK hanya empat orang sedangkan jumlah kelas 22.

- g. Guru reguler sering memaksakan kehendak kepada GPK terutama mengatasi materi yang tertinggal dan belum tercapai oleh siswa berkebutuhan khusus.
- h. Terkait dengan status GPK sampai saat ini masih tenaga pengajar honor lepas. Sampai saat ini belum ada perkembangannya sehingga GPK merasakan antara tugas yang dibebankan dengan finansial yang diterima sangat tidak seimbang. Berbagai upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kekurangan tersebut ternyata belum ada hasilnya.
- i. Terbatasnya ketersediaan buku panduan pembelajaran inklusi secara praktis yang akan digunakan sekolah dan guru untuk pembelajaran inklusi di sekolah.

Berdasarkan fakta di atas dapat penulis nyatakan bahwa melaksanakan pembelajaran inklusi yang efektif ternyata tidak mudah, memerlukan dukungan kuat semua pihak, baik dari pemerintah, sekolah terutama pendidik yang profesional, dukungan sarana dan peralatan media, serta ketersediaan dana. Semua tuntutan di atas penting untuk diketahui semua pihak untuk dicarikan jalan keluarnya agar sekolah ini mampu menjadi sekolah inklusi yang efektif.

Setelah penulis menyaksikan dan mencermati pelaksanaan pembelajaran selama dua tahun di sekolah ini, penulis mengapresiasi kepala sekolah yang tidak pernah berhenti berusaha menggalang dana dan mengajukan proposal pemberian pembelajaran inklusi kepada pemerintah daerah dan pusat, akan tetapi ternyata sampai penelitian ini selesai belum ada hasilnya. Lain halnya dengan SLB-SLB, pemerintah banyak memberikan bantuan peningkatan mutu termasuk peningkatan mutu pendidik dan sarana pembelajaran.

Ternyata keberadaan sekolah inklusi dan pembelajarannya terkesan terabaikan. Hampir dapat diduga upaya pemerintah melaksanakan UUSPN 2003 dengan misi utama memberikan kesempatan kepada semua siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran yang setara dan bermutu tak lebih dari sekedar regulasi saja. Pemerintah terbukti belum mampu memenuhi dan menyiapkan sekolah inklusi yang berkualitas, baik dalam hal regulasi, tata kelola, penyiapan sumber daya pendidik, kelengkapan sarana, prasarana, maupun sumber dan media pembelajaran yang dibutuhkannya. Kalau keterbatasan ini terus menimpa sekolah inklusi dan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah penyelenggara berarti pemerintah membiarkan sekolah melaksanakan pembelajaran inklusi secara subjektif sesuai kemampuannya masing-masing yang sulit dibayangkan hasilnya. Fakta ini memberikan kayakinan penulis bahwa sesungguhnya pemerintah hanya sekedar membunyikan tabuh dan lonceng pembelajaran inklusi di Indonesia saja, yang pada hakekatnya terkesan hanya melaksanakan

pedidikan untuk semua, tanpa perbedaan dengan nuansa penyetaraan, persamaan, dan integrasi siswa yang beragam peserta didik. Tambah lagi kalau pembelajaran ini terus berlangsung seperti temuan penulis ini, tanpa perhatian /minimnya kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka dapat diduga memang terbukti apa yang disinyalir oleh Mulyono (2003). Ababila kondisi ini tidak segera dibenahi maka hampir dipastikan pemerintah terkesan memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan program ini.

Ternyata keberadaan sekolah inklusi tak lebih dari penitipan siswa berkebutuhan khusus bergabung dengan siswa normal/regular sedangkan pembelajarannya terkesan terabaikan. Untuk itu hampir dapat diduga upaya pemerintah melaksanakan UU dengan misi utama memberikan kesempatan kepada semua siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran yang setara dan bermutu tak lebih dari sekedar regulasi saja. Dalam kenyataanya, pemerintah belum mampu memenuhi dan menyiapkan sekolah inklusi yang berkualitas, baik regulasi, tata kelola, penyiapan sumber daya pendidik, kelengkapan sarana, prasarana, sumber dan media pembelajaran yang dibutuhkannya. Kalau keterbatasan ini terus menimpa sekolah inklusi, dan sikap pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah penyelenggara berarti pemerintah membiarkan sekolah melaksanakan pembelajaran inklusi sesuai kemampuannya masing-masing maka sulit dibayangkan hasilnya. Fakta ini memberikan kayakinan kepada penulis bahwa sesungguhnya pemerintah hanya sekedar membunyikan tabuh

dan lonceng pembelajaran inklusi saja di Indonesia, yang pada hakikatnya terkesan hanya melaksanakan pendidikan untuk semua, tanpa perbedaan dengan nuansa penyetaraan, persamaan, dan integrasi siswa yang beragam peserta didik.

Akhirnya penulis menyatakan, potret suram penyelenggaraan pembelajaran inklusi menjadi pemandangan nyata, sementara lampu yang dinyalakan pemerintah tak kunjung bercahaya. Jika boleh penulis mengungkapkan fakta sesungguhnya lonceng kematian pembelajaran inklusi yang setara dan bermutu sudah mulai berbunyi. Namun di sisi lain masih tersisa perjuangan SMPN.23 Padang tanpa henti, semangatnya tidak pernah surut, mereka tidak mengeluh, dan tetap berupaya sesuai kemampuannya. Akhirnya temuan penelitian ini tak banyak yang dapat penulis ungkap dan sumbangkan secara spesifik, trend dan unik yang akan dipersembahkan kepada peneliti selanjutnya dan semua pihak, karena memang teramat banyak temua kedangkan dan ketidak lengkapan untuk sebuah pembelajaran inklusi yang setara dan bermutu terpenuhi. Berdasarkan hasil temuan ini terjawab sudah, bahwa apa yang disinyalir oleh Mulyono dan proposisi penulis tentang terjadinya benang kusut pembelajaran inklusi menjadi kenyataan. (via delorosa)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut kepada:

1. Pemerintah atau dinas pendidikan

- a. Pemerintah hendaklah memastikan keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi dengan mengeluarkan surat keputusan baik dari pusat maupun daerah, mengingat beban kerjanya sangat berat sedangkan statusnya tidak masuk dalam DAPODIK, dampaknya mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru. Kenyataan ini dipersulit lagi kerena statusnya di bawah naungan Kabupaten/ Kota, padahal kualifikasi tenaga guru pembibing khusus menjadi urusan dinas Provinsi.
- b. Dengan telah dicanangkannya pembelajaran inklusi di seluruh Indonesia, konsekuensinya pemerintah harus melakukan rentang kandali dan pemenuhan segala yang dibutuhkan untuk menuju sekolah inklusi yang setara dan bermutu.
- c. Pemerintah harus serius melakukan pemberahan dan pengembangan kembali baik konsep maupun implementasinya dengan tetap memperhatikan input, proses ,output dan memberikan dukungan nyata yang langsung menyentuh jantung pembelajaran.
- d. Pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan harus mengkaji kembali sedalam-dalamnya kebijakan melaksanakan program inklusi di sekolah regular, agar keberadaan siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah regular dapat terlayani secara professional.
- e. Jika penulis bandingkan perhatian dan perlakuan pemerintah pusat antara program inklusi dengan program sekolah-sekolah SLB baik negeri maupun swasta berbanding terbalik. Berdasarkan fakta penulis, hampir semua pendidiknya mendapatkan aneka pelatihan, peralatan, sumber, media

pembelajaran serta kesejahteraan gurunya nyaris terpenuhi. Sedangkan nasib pembelajaran inklusi terabaikan, hal ini karna sekolah inklusi seperti SD dan SMP diserahkan pengelolaannya kepada Kabupaten Kota. Sedangkan SLB menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan Provinsi yang semua kebutuhannya bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Untuk itu penulis berharap kepada pemerintah pusat dan provinsi agar melakukan evaluasi kebijakan serta berkoordinasi intensif dengan pemerintah kab/kota untuk menemukan solusi nyata, agar sekolah ini tidak diduga oleh masyarakat antara ada dan tiada (sekedar penitipan belajar).

- f. Untuk mengatasi keterbatasan referensi dan pedoman pembelajaran inklusi maka perlu diterbitkan buku panduan khusus untuk pelaksanaan pembelajaran inklusi agar dapat membantu guru melayani dan melaksanakan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.

2. Kepada Sekolah

- a. Terkait persiapan sekolah menuju sekolah inklusi yang setara dan bermutu, ke depan kepala sekolah harus berbenah diri dengan menyiapkan berbagai pengembangan konseptual dan implementasi pembelajaran inklusi yang terkait data: (a) freme work atau kosnsep pengembangan pembelajaran inklusi, (b) alur pengembangan pembelajaran inklusi, (c) alur pelaksanaan pembelajaran inklusi, dan (d) prinsip- prinsip yang dapat dipedomani untuk melaksanakan pembelajaran inklusi di SMPN 23 Padang sebagaimana yang penulis uraikandi dalam naskah pada halaman 42 sampai 52.

- b. Agar pelaksanaan pembelajaran inklusi efektif, sekolah hendaknya meninjau dan mengevaluasi kembali konsep dan pelaksanaan pembelajaran inklusi yang telah dilakukan dengan memperhatikan saran, referensi global dan nasional.
- c. Komitmen kepala sekolah harus dibuktikan dengan mempersiapkan pembelajaran inklusi yang terarah dan bermutu, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan pembelajaran yang setara dengan siswa normal.
- d. Terkait dengan keterbatasan sarana dan parasarana hendaknya kepala sekolah terus berupaya berjuang mengajukan usulan/permintaan kepada pemerintah baik daerah, pusat, swasta dan orang tua maupun masyarakat terutama membangun aksesibilitas/jalan untuk siswa dengan hambatan penglihatan dan siswa dengan hambatan fisik menuju kelas dan ruang lainnya di dalam lingkungan sekolah.
- e. Kepada sekolah harus melakukan sosialisasi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan dan menjamin siswa berkebutuhan khusus mendapat perlindungan hukum, hak dan kewajibannya serta melibatkan mereka dalam berbagai aktualisasi diri seperti ikut turnamen, aneka lomba olahraga, kesenian, pagelaran dan lain-lainnya sehingga pada gilirannya kemampuan siswa berkebutuhan khusus dapat dibuktikan.
- f. Kepada sekolah harus melakukan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, baik di dalam maupun di luar sekolah terutama dalam mengatasi berbagai kekurangan seperti pembiayaan, tenaga ahli dan lain-lain yang

dirasakan sekolah. Sehingga kelak sekolah mampu menangani dan melayani pembelajaran siswa berkebutuhan khusus dengan sebaik-baiknya.

g. Ke depan diharapkan sekolah harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh serta tindakan yang profesional di dalam melayani siswa berkebutuhan khusus, sehingga terhindar dari kesan siswa mayoritas menjadi prioritas dan siswa minoritas menjadi terabaikan. Ingat, bahwa setiap orang tua /keluarga besar siswa berkebutuhan khusus sangat berharap kepastian akan pelayanan setara dan bermutu dari sekolah harus menjadi kenyataan. Apalagi banyak anak-anak mereka memiliki potensi yang setara bahkan melampaui siswa normal tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan sekolah harus sungguh-sungguh menanganinya, mengambil posisi yang tepat, akuntabilitas dan transpransi pembelajaran. Untuk memenuhi amanat di atas sekolah tidak boleh berhenti belajar tentang siswa berkebutuhan khusus dan membela jarkannya secara professional dan ramah, jika tuntutan ini disia-siakan, apalagi diabaikan bahkan dibiarkan maka dapat diduga bahwa lonceng kematian sekolah inklusi sudah mulai berbunyi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2013). *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Magistra.
- Abdurrahman, M. (2003). *Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afrilianasari, F. (2014). *Pengembangan Modul Cetak Bergambar Ilustrasi Mata Pelajaran Seni Rupa untuk Peserta Didik Kelas VIII SMPN 6 Magelang*. UNY.
- Albrecht, G. L., & Snyder, S. L. (2005). *Encyclopedia of disability*. Sage.
- Alfian, A. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Biologi*, 4, 68–80.
- Alquier, J. (2013). Characteristics of School Administrator As Predictors of Instructional Management Leadership.
- American Association on Mental Retardation, A. (2002). *Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports* (10th ed.). Washington, DC: Author.
- Amin, M. (1995). *Ortopedagogik Anak Tunagrahita*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggrainy, R. N. (2014). *Proses Pembelajaran Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas V SD Negeri Giwangan Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ardisal, & Damri. (2013). Pelaksanaan Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1, 105–109.
- Arikunto, S. (2006). *Research Methods*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barton, L. (1997). Inclusive education: romantic, subversive or realistic? *International Journal of Inclusive Education*, 1(3), 231–242.
- Bellù, L. G. (2011). *Development and Development Paradigms A (Reasoned) Review of Prevailing Visions*. Italy: Food And Agriculture Organization Of The United Nations.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *From them to us: An international study of inclusion in education*.
- Buli-Holmberg, J., & Jeyaprathaban, S. (2016). Effective Practice In Inclusive And Special Needs Education. *International Journal of Special Education*, 31(1), 119–134.